



HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM KONTEKS MEKANISME CHECK AND BALANCES

Oleh :
Budi Kurniadi

ABSTRAK

Hubungan antara presiden dan DPR di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan pasca pemilihan presiden langsung sesuai amanat konstitusi telah mengalami pergeseran paradigma dan mengarah pada mekanisme *check and balances*, walaupun secara ideal masih sangat terbatas, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip *distribution of power* yang sangat berbeda maknanya dengan *prinsip separation of power*.

Melalui prinsip *distribution of power* masing-masing lembaga masih dituntut untuk melakukan kerjasama yang harmonis dan menjalin keserasian diantara cabang kekuasaan. Melalui penyempurnaan system presidensial yang dilaksanakan serta di Indonesia serta pelaksanaan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat haruslah diakui bahwa pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengalami perubahan mendasar mengarah pada perwujudan pemerintahan yang adil dan demokratis.

Kata kunci: **Eksekutif, Legislatif, Check And Balances**

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. 1991, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Pustaka Utama Gramedia, Jakarta.

Fatwa, AM, 2004, Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi, Jejak langkah parlemen Indonesia 199-2004, Rajawali press. Jakarta.



Lipjart,Mend,1995, Sistem Parlemerter dan Presidensil, Penyadur Ibrahim R,dkk, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

Kurniadi,Budi,2005, Sistem Pemilihan Umum dan Demokrasi di Indonesia, Yayasan Duta Bhineka Madani,Bandung.

Kantaprawira, Rusadi, 1987,Sistem Politik Indonesia,Balai Pustaka,Jakarta

Peraturan Tata Tertib DPR-RI 2004(eksemplar lepas)

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen (eksemplar lepas)

**GLOBALISASI ANTARA KETERGANTUNGAN
DAN KETERTINGGALAN
(Studi Analisis Terhadap Krisis yang Berkepanjangan)**

Oleh :
Acep Juandi

ABSTRAK

Tantangan globalisasi menuntut kemampuan serta kesiapan untuk mampu bersaing secara kompetitif dalam konteks pasar global yang lebih menekankan pada efisiensi dan produktifitas tinggi. Dalam menghadapi globalisasi tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material semata, tetapi harus mampu juga menciptakan kondisi-kondisi yang membuat manusia bisa mengembangkan kreatifitasnya. Artinya harus mampu memanfaatkan segala bentuk peluang yang berasal dari luar maupun dari dalam (eksternal-internal) sebaik-baiknya seiring arus globalisasi yang mengarah pada pemanfaattan (mengeksplotasi) terhadap negara-negara berkembang.



Untuk menghadapi fenomena globalisasi, langkah langkah yang dapat ditempuh antara lain: Adanya keseriusan dan sikap konsisten terhadap pembangunan sumber daya manusia yang kreatif, yang mampu memecahkan segala persoalan yang dihadapinya; Membangun system politik, ekonomi dan pemerintahan yang bersih dan berorientasi maju, yang berpihak untuk kepentingan rakyat; Mendorong sikap kompetitif terhadap rakyat, dengan menciptakan kondisi non-material (kondisi aman, bebas dan demokratis) supaya mempunyai daya saing sesuai tuntutan globalisasi; Bersikap terbuka untuk menerima bentuk tekanan eksternal, dengan strategi memanfaatkannya untuk kepentingan bangsa. Oleh karena itu diperlukan pemimpin yang kuat (otoriter sekalipun) asal konsisten terhadap tujuan dan kepentingan rakyat dan bangsa serta menumbuhkan sikap bersaing yang ditunjang dengan kemampuan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu factor pendidikan menjadi sangat penting dalam mempersiapkan strategi pembangunan dalam era globalisasi ini.

Kata kunci: Globalisasi, Modernisasi dan Faktor internal dan eksternal

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman. Arief 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Chaniago.Andrinof A. 2001. *Gagalnya Pembangunan (Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia)*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Clements. Kevin P. 1997. *Teori Pembangunan Dari Kiri Ke Kanan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Haferkamp. Hans Neil J. Smelser. 1997. *Perubahan Sosial dan Modernitas*. PPs. UNPAD. Bandung.
- Kartasmita. Ginanjar 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Pustaka CIDESINDO. Jakarta.
- Hirst. Paul, Grahame Thompson. 2001. *Globalisasi Adalah Mitos*. Yayasan Obor Indonesia.



- Huntington.Samuel P. 2003. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. CV. Qalam. Yogyakarta.
- Pelly, Usman Asih Menanti 1994. *Teori-Teori Sosial Budaya*. Dikti. Indonesia.
- Roxborough.Ian 1990. *Teori-Teori Keterbelakangan*. Pustaka LP3ES. Indonesia

**CARA RESISTENSI PEDAGANG KAKILIMA
TERHADAP KEBIJAKAN PENGENDALIAN
PEDAGANG KAKILIMA DI KOTA BANDUNG**

Oleh:

Arnia Fajarwati

ABSTRAK

Penelitian ini diawali dengan permasalahan semakin menjamurnya PKL di area Alun-alun Kota Bandung terutama menjelang bulan ramadhan. Kebijakan pemda Kota Bandung dalam pengendalian PKL ini seringkali mendapat reaksi antipati atau resisitensi dari para PKL, dari mulai main kucing-kucingan sampai dengan tindakan perlawanan kepada para petugas (bentrok fisik). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Deskriptif analisi dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kurang berhasilnya penanganan PKL ini lebih disebabkan oleh kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah No.11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan K3.

Selain itu Pemerintah tidak berusaha menciptakan lapangan pekerjaan baru bahkan lebih cenderung berorientasi kepada pembangunan mal-mal dan pusat perbelanjaan lainnya, juga masih ada tindakan pungutan untuk pembayaran harian jasa pelayanan kebersihan pasar/berjualan termasuk kepada PKL. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengatasi PKL ini adalah agar dapat mengapresiasi penertiban pedagang kaki terutama : a). Dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan



PKL melibatkan organisasi sektor informal; b) Adanya tindakan monitoring dan pola kegiatan patroli yang se-intensif mungkin; c) Penegakan sangsi yang tegas dari para aparat.

Kata Kunci : **Kebijakan Pemerintah, Resistensi, PKL (vendors)**

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, 2005. *Sisi Gelap Perkembangan Kota*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo
- _____. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press
- Bungin, B., 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- BPS Kota Bandung. 2008. *Bandung Dalam Angka 2008*. Bandung. BPS.
- Cross, J.C.1998. *Co-optation, Comptition, and Resistance: State and Street Vendors in Mexico City*. *Latin American Perspectives* 25 (2): 41-61
- Firdausy, C.M. 1995. *Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. Jakarta. Dewan Riset Nasional dan Bappenas Pustitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.
- Lubis I, 1985, *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen, Jakarta, Graha Indonesia*
- Koentjaraningrat. 1981. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kompas. 6 September 2010
- Manning, and Tadjuddin, N. E. 1991. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Mustafa, A. A. 2008.a. *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima Dalam Pusat Modernitas*. Malang: Inspire
- _____. 2008.b. *Model Transformasi Sektor Informal Sejarah, Teori dan Praksis, Pedagang Kaki Lima*. Malang: Inspire
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.



- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
Pikiran Rakyat. 15 Oktober 2008
_____ 11 Oktober 2010.
- Rachbini, D. J. Dan Hamid A.. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan: Gejala Involasi Gelombang Kedua*. Jakarta. LP3ES.
- Salim, A. 2002. *Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Jogyakarta PT., Tiara Wacana.
- Sobarsono, 2009. *Analisis Kebijakan Publik*.Jogyakarta: Pustaka Pelajar
- Scott, J. C. 2000. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah Bentuk-Bentuk Resistensi Sehari-hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Seputar Indonesia, Jakarta. 4 September 2010
- Tribun Jabar, 4 April 2010
[http:// ejuournal.unud.ac.id](http://ejuournal.unud.ac.id)
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

**HUBUNGAN PENGAWASAN DENGAN EFEKTIVITAS
PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DI KECAMATAN REGOL KOTA BANDUNG**

Oleh :
Nia Pusparini

ABSTRAK

Pengelolaan Program Sekolah Gratis Biaya Operasional Sekolah (BOS) ditandai oleh berbagai masalah yang terjadi Di Kecamatan Regol Kota Bandung belum berjalan efektif. Salah satu faktor yang diduga menyebabkan tidak efektifnya pengelolaan program sekolah gratis BOS yaitu tidak optimalnya dimensi pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan formal, pengawasan informal, pengawasan administratif, dan pengawasan teknis di kecamatan Regol kota Bandung.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program sekolah gratis BOS belum secara menyeluruh melaksanakan teknik-teknik pengawasan secara optimal. Hal tersebut mengindikasikan adanya kelonggaran pengawasan yang dilakukan oleh kepala Dinas Pendidikan sehingga banyak terjadi kebocoran-kebocoran anggaran sebelum sampai ke sekolah-sekolah/madrasah (tingkat SD, SMP, SMA/SMK). Dampak lainnya yang terjadi adanya komitmen di luar aktivitas anggaran BOS sehingga muncul penyimpangan-penyimpangan anggaran sebelum sampai kepada sekolah yang dituju.

Dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan dan kuat dalam mengoptimalkan pengelolaan program sekolah gratis BOS melalui dimensi produktivitas, efisiensi, kepuasan kerja, fleksibilitas, dan pengembangan. Kedua variabel tersebut mengacu pada ketentuan pemerintah sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dan keputusan Walikota Nomor 420/Kep.432- Disdik/2009 Tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Alokasi Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun 2009.

Kata Kunci : Pengawasan, Program Sekolah Gratis Biaya Operasional Sekolah (BOS).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdurrahman, Arifin.2001. *Kerangka Pokok Manajemen*.Jakarta: Ikhtiar Baru.

Arikunto,Suharsimi.2001.*Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Gibson, Ivancevich, & James, Donnely. 1996. *Organisasi Perilaku Struktur Proses*. Jilid Satu. Terjemahan : Nunuk Ardiani. Jakarta: Bina Aksara.



- Hasibuan, Malayu. 1996. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Handayani, Soewarno. 2000. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Kencana, Inu. 2002. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manulang. 1998. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia Jakarta
- Mukijat. 1991. *Latihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Mandar Maju. Bandung.
- Noor, Muhammad. 1994. *Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Serta Hubungan Dengan Efektivitas Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Kabupaten Pasir Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur*. Bandung: Tesis UNPAD.
- Osborne, David dan Ted Gebler. 1995 (Terjemahan). *Mewirauahakan Birokrasi, Reinventing Government, Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Siagian, Sondang. 1989. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Soejito, Irawan. 1993. *Pengawasan Terhadap dan Keputusan Kepala Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabes.
- Sujanto. 1996. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukarno. 1982. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Miswar.
- Winardi. 2000. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.



B. Dokumen lainnya:

Anonimus. 2004. Undang-Undang otonomi daerah nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri RI.

Anonimus. 2009. Peraturan Walikota Bandung Nomor 433 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Oprasional Sekolah(BOS) Pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009*. Bandung.

Anonimus. 2009. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 420/Kep.432-Disdik/2009 Tentang *Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Alokasi Dana Biaya Oprasional Sekolah (BOS) Pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis DiKota Bandung Tahun Anggaran 2009*.Bandung.

PERSPEKTIF DINAMIKA PEMBANGUNAN VERSUS KESADARAN BERPOLITIK ATAS PEMBANGUNAN JALAN DAGO-LEMBANG

Oleh:
Emmy Rachmawati

ABSTRAK

Pengelolaan Program Sekolah Gratis Biaya Operasional Sekolah (BOS) ditandai oleh berbagai masalah yang terjadi Di Kecamatan Regol Kota Bandung belum berjalan efektif. Salah satu faktor yang diduga menyebabkan tidak efektifnya pengelolaan program sekolah gratis BOS yaitu tidak optimalnya dimensi pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan formal, pengawasan informal, pengawasan administratif, dan pengawasan teknis di kecamatan Regol kota Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program sekolah gratis BOS belum secara menyeluruh melaksanakan teknik-teknik



pengawasan secara optimal. Hal tersebut mengindikasikan adanya kelonggaran pengawasan yang dilakukan oleh kepala Dinas Pendidikan sehingga banyak terjadi kebocoran-kebocoran anggaran sebelum sampai ke sekolah-sekolah/madrasah (tingkat SD, SMP, SMA/SMK). Dampak lainnya yang terjadi adanya komitmen di luar aktivitas anggaran BOS sehingga muncul penyimpangan-penyimpangan anggaran sebelum sampai kepada sekolah yang dituju.

Dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan dan kuat dalam mengoptimalkan pengelolaan program sekolah gratis BOS melalui dimensi produktivitas, efisiensi, kepuasan kerja, fleksibilitas, dan pengembangan. Kedua variabel tersebut mengacu pada ketentuan pemerintah sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dan keputusan Walikota Nomor 420/Kep.432- Disdik/2009 Tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Alokasi Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun 2009.

Kata Kunci : Pengawasan, Program Sekolah Gratis Biaya Operasional Sekolah (BOS).

DAFTAR PUSTAKA

- A l f i a n, Beberapa Masalah Pembaharuan Politik di Indonesia, Leknas, Jakarta 1971.
- Almond, Gabriel A, and Bingham Powell Jr, *Comparative Politics A Developmental Approach*, Bombay, 1966.
- Aswindi, Widdi. 2002. Studi Perilaku Politik Dalam Pemanfaatan Ruang Publik Studi Kasus: Perilaku Politik Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kota Majalaya . Tugas Akhir. Departemen Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Clegg, Stewart R.1989.*Frameworks of Power*. Sage Publication, London
- Dwicaksono, Adenantera.2003. *Kajian Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan; Masukan bagi*



penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Bandung. Tugas Akhir. Departemen Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung, Bandung.

- Few, Roger. 2002. *Researching actor power: analyzing mechanisms of interaction in negotiations over space*. Artikel. Royal Geographical Society.
- Flyvbjerg, Bent. 2002. *Bringing Power to Planning Research*. Artikel. Journal of Planning Education and Research.
- Friedman, John. 1987. *Planning in The Public Domain, From Knowledge to Action*, Princeton University Press, New Jersey
- Forrester, John. 1989. *Planning in The Face of Power*. University of California Press, Los Angeles.
- Gellner, Ernest. 1994. *Membangun Masyarakat Sipil; Prasyarat Menuju Kebebasan*. Penerbit Mizan, Bandung
- Healey, Patsy. 1997. *Collaborative planning*. Macmillan Press.
- Mollenkopf, John. 1992. *How to study urban political power*. The City Readers. London Rutledge. Page; 219-228.
- Ikhsan, Muhammad. 2002. *Perbedaan Persepsi Partisipasi dalam Proses Perencanaan Partisipatif. Studi Kasus; Forum City Development Strategy, Kota Bandung*. Tugas Akhir. Departemen Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung, Bandung
- Samsura, Datuk A Adriansyah. 2002. *Participatory Planning, Good Governance dan Civil Society*. Artikel.
- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung
- Kumpulan Artikel dari sumber sebagai berikut ;
- Kliping Bening, Edisi Politik, nomor 330/Minggu III/Agustus 2004
 - Kliping Bening, Edisi Politik, nomor 365/Minggu IV/April 2005
 - Ketetapan MPR 1999 dan GBHN-RI 1999-2004
 - Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
 - www.pikiran-rakyat.com
 - www.kompas.com



www.republika.co.id
<http://www.tempointeraktif.com>

PERLAKUAN SALAH TERHADAP ANAK (PSTA) DALAM PENDEKATAN PEKERJAAN SOSIAL

Oleh :
Henny Setiani

ABSTRAK

Tingginya angka Perlakuan Salah Terhadap Anak (PSTA) di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang *pertama* adanya kekerasan di rumah yang dilakukan oleh ibu, bapa, *kedua* adanya disfungsi keluarga, dan yang *ketiga* adalah faktor ekonomi. Masalah PSTA selain merupakan pelanggaran terhadap hak anak juga merupakan masalah yang sangat mengancam kesejahteraan sosial anak. Campur tangan pemerintah dalam masalah PSTA tidak dapat menekan atau menghilangkan masalah PSTA. Masalah PSTA sangat relevansi dengan Profesi Pekerjaan Sosial oleh karena masalah PSTA merupakan salah satu bidang garapan dalam upaya kesejahteraan sosial anak. Maka di dalam memberikan pelayanan terhadap PSTA dipergunakan *model Intervensi Pekerjaan Sosial dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak* dan *model Holistik-Komprehensif* dengan mempergunakan strategi; *Child Based Services, Institutional Based Services, Family Based Services, Community Based Services Location, Based Services, Half-way House Services, dan State Based Services*. Upaya pelayanan ini diberikan dengan harapan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan masalah PSTA sehingga anak dapat hidup dengan sejahtera selaras dengan yang dicita-citakan di dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Kata Kunci: Perlakuan Salah Terhadap Anak, anak, Pelayanan kesejahteraan sosial



DAFTAR PUSTAKA

- Achlis. 1997. Pekerja Sosial Sebagai Profesi dan Praktek Pertolongan. Bandung: STKS.
- Kartono, Kartini. 1992. Peranan Keluarga Memandu Anak. Jakarta: CV. Rajawali.
- Kartono, Kartini. 1992. Psikologi Anak. Jakarta: CV. Rajawali.
- Suharto, Edi. 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: LSP-STKS.
- Sukoco. Heru Dwi. 1991. Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya. Bandung: STKS.
- Soetarso. 1993. Metoda-Metoda Penyembuhan Sosial Dalam Praktek Pekerjaan Sosial. Bandung: STKS.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979. Pasal 2 tentang Kesejahteraan Anak.
Artikel Komnas Perlindungan Anak
